

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara di dunia, terutama negara-negara berkembang, menghadapi kemiskinan. Menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan terakhir yang ingin dicapai oleh suatu negara. Kemiskinan di Indonesia adalah masalah penting karena memiliki konsekuensi yang melibatkan stabilitas politik, ekonomi, dan sosial bangsa. Dengan demikian, setiap upaya pembangunan ekonomi harus menempatkan pengurangan kemiskinan sebagai prioritas utama (Arifin, 2019)

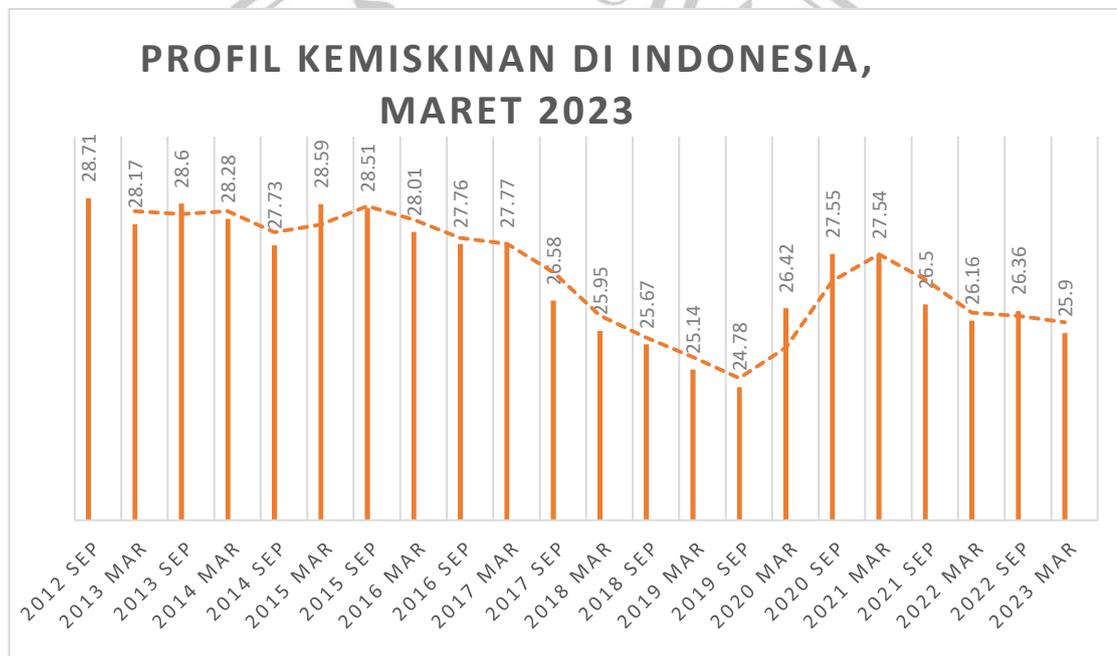
Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat serius karena melibatkan berbagai aspek, tidak hanya terbatas pada dimensi ekonomi, melainkan juga mencakup isu-isu sosial, demografi, dan dampak kebencanaan di suatu wilayah. Kondisi kemiskinan menyebabkan individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, yang pada gilirannya mengakibatkan penurunan tingkat kesejahteraan. Pengurangan tingkat kemiskinan menjadi salah satu prioritas universal yang ingin dicapai oleh semua negara di dunia, sebagaimana tercermin dalam Sustainable Development Goals (SDGs) dengan target utama penanggulangan kemiskinan (Engström, 2023)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada periode 2015-2019 menegaskan tujuan SDGs ini dengan misi pemerataan pembangunan yang berkeadilan, salah satunya adalah penanggulangan kemiskinan. Dalam RPJMN 2020-2024, fokus diperkuat melalui penguatan ketahanan ekonomi sebagai langkah menuju pencapaian agenda keadilan dan kesejahteraan. (Desinta & Sitorus, 2021)

Pada bulan Maret 2023, sekitar 25,9 juta orang di Indonesia hidup dalam kondisi kemiskinan, dari data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah masyarakat miskin ini mengalami penurunan sekitar 460 ribu orang dibandingkan dengan bulan September 2022, atau turun sebanyak 260 ribu orang jika dibandingkan dengan situasi pada bulan Maret tahun sebelumnya. (BPS, 2023). Angka tersebut menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan

dengan tahun 2020, saat jumlah penduduk miskin mencapai 27,55 juta akibat dampak pandemi virus corona. Para pejabat, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus sangat memperhatikan peningkatan tingkat kemiskinan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Untuk membantu masyarakat, khususnya mereka yang terkena dampak dan semakin terperosok ke dalam kemiskinan akibat pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia dapat mengambil langkah-langkah seperti memperkuat program perlindungan sosial. maka dari itu, peran negara sangat penting dalam memerangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Gambar 1.1 Profil Kemiskinan Di Indonesia, Maret 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

Negara memiliki tanggung jawab utama supaya mengupayakan perlindungan dan rasa aman kepada semua warganya dari berbagai bentuk ancaman. Selain itu, negara juga bertanggung jawab menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat. (Sari & Sanjani, 2023). Dalam konteks keamanan, negara dapat mencapai tujuan tersebut dengan merumuskan kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan. Munculnya istilah kebijakan sosial mengindikasikan adanya upaya negara untuk menyediakan layanan sosial kepada warganya. Kebijakan dan program pemerintah seperti perlindungan sosial

bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk kesejahteraan sosial yang lebih baik.

Konsep yang luas, perlindungan sosial menunjukkan perubahan ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Tujuan program perlindungan sosial adalah supaya memberikan rasa aman dan perlindungan untuk masyarakat sehingga negara menjadi lebih baik. Kebijakan publik, atau kebijakan sosial, berkaitan dengan konsep negara kesejahteraan. Kebijakan sosial mencakup rencana dan tindakan pemerintah untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu komponen perlindungan sosial adalah jaring pengaman sosial, yang juga disebut pengaman sosial, dan jaminan sosial, yang terdiri dari bantuan sosial dan asuransi sosial. Perlindungan sosial sangat dibutuhkan masyarakat, terlebih respons kebijakan terhadap pandemi COVID dimana masyarakat sangat bergantung pada bantuan tunai untuk mempertahankan penghidupan yang terganggu akibat krisis ekonomi (Arena et al., 2023)

Konsep kesejahteraan negara mengacu pada kewajiban negara terhadap kesejahteraan warganya. Menurut Encyclopedia Britannica, kesejahteraan negara adalah ide tentang pemerintahan di mana negara memerankan aksi penting dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyatnya. Menurut Concise Oxford Dictionary of Politics, itu juga didefinisikan sebagai suatu sistem di mana pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan jaminan sosial dan ekonomi kepada rakyatnya dengan berbagai cara, seperti pensiun, tunjangan jaminan sosial, pelayanan kesehatan gratis, dan sebagainya. (Yunus, 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2010 mengenai Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, hingga saat ini, Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari permasalahan kemiskinan yang terus berlanjut sejak krisis ekonomi yang berkepanjangan (Rahman, 2010). Dengan demikian, dari tahun 2007, Pejabat pemangku kepentingan masyarakat telah mengimplementasikan Program Keluarga Harapan sebagai upaya percepatan dalam menanggulangi dan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. PKH merupakan suatu program bansos yang bersyarat, diarahkan untuk keluarga sangat miskin yang diidentifikasi sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH. Model PKH berasal dari Program Conditional Cash Transfer (CCT), dimana berhasil diterapkan di beberapa negara

Amerika Latin seperti Kolombia, Argentina, Ekuador, Brazil dan Venezuela. Telah terbukti bahwa program ini dapat meningkatkan kesehatan, meningkatkan partisipasi dalam pendidikan, dan mengurangi tingkat kemiskinan.(Nurwan & Hasan, 2020).

Sebelum Program Keluarga Harapan diterapkan di Indonesia, sudah terlebih dahulu diterapkan di Brazil dengan nama *programa bolsa familia*, Programa Bolsa Família (PBF) adalah salah satu program bantuan tunai bersyarat terbesar di dunia. Sebagai hasil dari perpaduan dan perluasan program-program yang ada dan dimulai pada tahun 2003 pada tahun pertama masa kepresidenan Luíz Inácio 'Lula' da Silva (Pereira, 2015)

Orang-orang yang kurang mampu menerima bantuan melalui program perlindungan sosial yang disebut Program Keluarga Harapan. dimana memiliki persyaratan pendidikan dan kesehatan dalam keluarga mereka, yang sering disebut sebagai keluarga sangat miskin. utamanya program tersebut berorientasi untuk meningkatkan akses masyarakat melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Nimas Aulia Nandha Pratama et al., 2020)

Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan menetapkan hak-hak keluarga penerima manfaat (KPM) PKH, termasuk Bantuan Sosial PKH; Pendampingan PKH; Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial; serta Program Bantuan Komplementer dalam bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, pemukiman, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya bagi keluarga penerima PKH (Sofianto, 2020)

Pada konsep CCT Keluarga Penerima Manfaat diwajibkan untuk berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan untuk terdaftar serta secara rutin mengunjungi fasilitas kesehatan. Bagi KPM yang usia sekolah, keterlibatan aktif dalam proses pendidikan juga menjadi kewajiban (Rukiko et al., 2023) . Sebagai imbalannya, KPM PKH menerima manfaat berupa uang tunai, dengan jumlah yang bervariasi tergantung pada jenis dan jumlah kriteria PKH yang dipenuhi oleh keluarga. Selain itu, partisipasi dalam Family Development Sessions (FDS) atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) menjadi bagian penting dari program ini. Sesi bulanan ini diselenggarakan oleh pendamping program dan

membahas keterampilan hidup utama, seperti pengasuhan anak, kesehatan, dan manajemen keuangan. Tujuan keseluruhan dari program-program ini adalah untuk mengurangi kerentanan rumah tangga dalam jangka pendek dan memutus transmisi kemiskinan antargenerasi dengan berinvestasi pada pembentukan sumber daya manusia (Sanchez Chico et al., 2020a) Dengan melibatkan hingga sepuluh juta KPM, PKH telah berkembang menjadi program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) terbesar kedua di dunia, hanya di bawah Bolsa Familia di Brasil. (Syamsulhakim & Nurzanty, 2020)

Jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang berhasil menyelesaikan pendidikan mereka adalah indikator keberhasilan program. Graduasi alami dan mandiri adalah jenis graduasi di mana penerima PKH secara sukarela memutuskan untuk tidak lagi menerima bantuan PKH. Jenis graduasi ini biasanya terjadi ketika keluarga penerima PKH telah mencapai taraf kesejahteraan dan ekonomi yang stabil. Sementara itu, graduasi alami terjadi ketika penerima PKH berhenti menerima bantuan karena adanya perubahan pada komponen yang menjadi syarat keikutsertaan dalam program. Sebagai contoh, penerima PKH yang telah menyelesaikan pendidikan SMP dan SMA akan secara otomatis berhenti dari program setelah tidak lagi bersekolah. Adanya graduasi mandiri, di mana keluarga penerima manfaat PKH secara sukarela meninggalkan program karena telah mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan, merupakan indikator keberhasilan program PKH. (Riztiana & Handoyo, 2021)

Gambar 1.2 Data Graduasi KPM PKH 2020-2023



Sumber: Subdit Validasi dan Terminasi Direktorat Jaminan Sosial Kemensos RI

Melalui diagram diatas dimana dari tahun 2021 hingga 2023 mengalami penurunan graduasi yang signifikan, dari data tersebut diketahui angka tersebut didapat dari berbagai sebab seperti DTKS yang tidak aktif dikarenakan diketahui salah satu anggota keluarga terdaftar ASN/POLRI/TNI/PEJABAT, keluarga memiliki upah diatas UMP, KPM meninggal dunia, terdapat KPM Mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial, tidak ada komponen, dan tidak layak hasil assessment Lapangan dll. Dengan adanya penurunan drastis KPM graduasi ditahun 2021 hingga 2023, untuk itu perlu adanya upaya dari Kementerian Sosial RI untuk mengambil langkah strategi percepatan graduasi KPM PKH. Maka dari itu, kebijakan PKH saat ini berfokus pada graduasi KPM.

Kementerian Sosial dalam Program Keluarga Harapan hanya terdapat sepuluh juta kuota Keluarga Penerima manfaat, hal tersebut tentunya tidak sebanding dengan tingginya angka kemiskinan di Indonesia, maka dari itu, Kementerian Sosial didalam Rencana Strategis tahun 2020-2024 mengupayakan target 10% KPM graduasi atau keluar dari bantuan sosial sehingga bantuan atau kuota PKH dapat alihkan kepada masyarakat yang belum menerima bantuan sosial, akan tetapi, pada implementasinya dilapangan, tidak mudah untuk mencapai target graduasi KPM PKH, terutama mengupayakan graduasi mandiri, hal tersebut dikarenakan banyak masyarakat yang masih ketergantungan dengan bantuan sosial, sehingga enggan untuk mengajukan graduasi mandiri. Banyak factor-faktor lainnya yang menyebabkan KPM tidak mau digraduasi, maka dari itu perlu adanya upaya dan strategi dari Kementerian Sosial untuk mengatasi permasalahan tersebut dan demi tercapainya target 10% graduasi KPM disetiap tahunnya.

Sumber Daya Manusia Pelaksana (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) dapat menggunakan gelar KPM berdaya sebagai standar kinerja. Kesuksesan kebijakan PKH bukan hanya memastikan bantuan sosial disalurkan dengan tepat sasaran dan lancar. Poin pentingnya adalah bagaimana kebijakan ini dapat efektif dalam mengatasi kemiskinan dengan menghasilkan Keluarga Penerima Manfaat yang berhasil di-graduasi. Tidak hanya sekedar tidak memenuhi syarat kepesertaan, graduasi yang diinginkan adalah menjadi KPM PKH yang memiliki daya. Kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan warga negara tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga melihatnya sebagai investasi dalam menciptakan

kekuatan dan kemandirian masyarakat. Dengan demikian, graduasi KPM berdaya mencerminkan keberhasilan kebijakan dalam memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi keluarga penerima manfaat..(Maulidah, 2021)

Tujuan dari upaya graduasi mandiri Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk membantu penerima PKH belajar menjadi lebih mandiri. Hal ini dilakukan karena fakta bahwa penerima PKH tidak selalu akan menerima bantuan pemerintah. Oleh karena itu, tujuannya adalah agar mereka dapat mandiri dengan menggunakan bantuan yang telah mereka terima sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu bergantung pada pemerintah lagi. Tidak banyak penerima PKH yang mau atau mampu menjalani proses graduasi mandiri, meskipun beberapa dari mereka telah berhasil mendirikan usaha kecil yang berjalan lancar. Oleh karena itu, peran pendamping PKH sangat penting untuk melakukan sosialisasi terkait proses graduasi.

Sosialisasi ini dapat mencakup pemahaman mengenai manfaat dan langkah-langkah yang perlu diambil saat melakukan graduasi, serta pembekalan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha mandiri. Penting untuk mengetahui strategi Kementerian Sosial dalam membuat kebijakan graduasi KPM PKH agar dapat memotivasi dan memberdayakan penerima PKH untuk mandiri. Ini bisa melibatkan pengembangan program pelatihan, pendampingan yang lebih intensif, dan insentif lainnya yang dapat meningkatkan minat dan kesiapan penerima PKH dalam melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi mandiri.

1.2 Rumusan Masalah

Melalui deskripsi masalah tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi yang dilakukan Kementerian Sosial terkait kebijakan graduasi KPM PKH?
2. Apa Kendala dan tantangan yang dialami Kementrian Sosial dalam implementasi kebijakan graduasi KPM PKH?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menggambarkan Strategi yang dilakukan Kementerian Sosial terkait kebijakan graduasi KPM PKH

2. Mengetahui Kendala dan tantangan apa saja yang di alami Kementerian Sosial terkait perumusan dan implementasi kebijakan graduasi KPM PKH

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Studi penelitian bisa memberikan sumbangan pemikiran untuk pembaharuan ilmu, khususnya ilmu pemerintahan, dan menjadi bahan acuan untuk penelitian lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis untuk penulis penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman kita dan pengalaman langsung terkait strategi Kementerian Sosial dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan graduasi KPM PKH. Manfaat praktis bisa didapatkan pemerintah melalui hasil penelitian ini meliputi: temuan penelitian dapat berfungsi sebagai panduan yang berharga bagi pemerintah dalam merumuskan dan menyusun strategi serta kebijakan publik. Hasil penelitian dapat memberikan wawasan lebih mendalam terkait implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan tingkat efektivitasnya, memberikan dasar bagi pemerintah untuk meningkatkan kebijakan, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan mengevaluasi kesuksesan program secara menyeluruh. Selain itu, penelitian juga dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut serta menyajikan informasi tentang kontribusi PKH terhadap peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, temuan penelitian ini dapat menjadi landasan yang penting bagi pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih terinformasi guna mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.5 Definisi Konseptual

Penelitian ini menggunakan definisi konseptual berikut:

1.5.1 Strategi

kata "strategi" memiliki akar kata dari bahasa Yunani, yaitu "strategia," yang mencakup dari "stratos" bermakna militer, kemudian "ag" artinya memimpin. Secara harfiah, Strategi adalah seni atau ilmu memimpin

militer. Dalam konteks umum, strategi merujuk pada rencana atau tindakan yang direncanakan dengan cermat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan strategi sebagai ilmu dan seni penggunaan seluruh sumber daya negara supaya menerapkan kebijaksanaan tertentu baik melalui konteks perang maupun damai. Dalam penggunaan umum, istilah strategi tidak hanya terbatas pada lingkup militer, melainkan juga dapat merujuk pada perencanaan dan tindakan yang disusun secara hati-hati untuk mencapai tujuan dalam berbagai bidang, seperti bisnis, politik, dan organisasi. (Anjani et al., 2023)

Strategi adalah titik awal dalam perencanaan yang dipilih oleh perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. pada umumnya, strategi merujuk pada proses perencanaan yang dilakukan oleh pemimpin puncak perusahaan dengan fokus pada pencapaian tujuan jangka panjang., termasuk langkah-langkah atau usaha untuk mencapainya. Strategi umumnya berorientasi ke masa depan, dan penyusunannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai strategi yang telah ditetapkan dan memperoleh keunggulan kompetitif, para pimpinan perlu bekerja dalam kerangka sistem perencanaan strategis (Khairo, 2019)

1.5.2 Kemiskinan

World Bank pertama kali mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup minimal pada tahun 1990. Kemudian, pada tahun 2004, mereka memperinci definisinya. Mereka berpendapat bahwa kemiskinan terdiri dari berbagai aspek, termasuk kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, kondisi kesehatan yang buruk, kesulitan mendapatkan perawatan medis, keterbatasan akses ke pendidikan dan keterampilan membaca, kekurangan pekerjaan, dan kekhawatiran tentang masa depan. Kemiskinan juga melibatkan kematian anak karena penyakit yang disebabkan oleh air tercemar. Secara keseluruhan, kemiskinan mencerminkan situasi di mana seseorang tidak memiliki kemandirian, tidak memiliki wakil, dan tidak memiliki kebebasan. (Airus, 2012)

1.5.3 Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan upaya pemahaman manusia dalam menyelesaikan masalah tertentu. Kebijakan dirancang untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi manusia. Pemerintah, sebagai lembaga tinggi negara, bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan untuk kepentingan rakyatnya. Namun, respons masyarakat terhadap kebijakan bisa beragam, ada yang menerimanya dengan baik, namun ada juga yang menolaknya (Abdal, 2015).

Anderson dkk (1978) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor. berkaitan dengan suatu permasalahan atau persoalan yang harus diwaspadai (Amir, 2020) Sedangkan menurut Thomas R. Dye menyatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih atau tidak dipilih oleh pemerintah. Dengan kata lain, kebijakan publik mencakup segala tindakan atau keputusan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah. Hal ini kemudian dapat dijadikan dasar untuk pembuatan peraturan-peraturan perundang-undangan atau diungkapkan melalui policy statement, seperti pidato atau wacana, yang selanjutnya diimplementasikan melalui program-program dan tindakan pemerintah. (Yaw, 2008)

1.5.4 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan ialah tahapan strategis yang dilakukan setelah adanya proses perumusan suatu kebijakan, dikarenakan pada tahap ini suatu kebijakan akan diuji, baik secara substantif maupun tingkat efektivitas penggunaannya (Turhundayani, 2020)

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan Langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik

penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas dll (Mustari, 2015)

1.5.5 Graduasi

Graduasi dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH) dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana kriteria kepesertaan tidak terpenuhi atau terjadi peningkatan dalam kondisi sosial-ekonomi suatu keluarga. Proses ini diverifikasi melalui kegiatan pemutakhiran data, yang melibatkan pembaruan informasi mengenai anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Pendamping sosial bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data ini menggunakan platform seperti e-PKH atau SIKS-Droid untuk memperoleh informasi terkini mengenai kondisi anggota KPM PKH..

Ada dua jenis proses keluar dari Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu graduasi alamiah dan graduasi mandiri. Graduasi alamiah terjadi ketika suatu keluarga tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan PKH. Sebaliknya, graduasi mandiri terjadi karena peningkatan status ekonomi dan sosial, sehingga keluarga dianggap sudah mampu dan tidak lagi memerlukan bantuan sosial PKH. Keluar dari program dapat dilakukan baik atas inisiatif keluarga itu sendiri atau karena dorongan dari pendamping sosial atau pihak lain. Sebagai contoh, keluarga dapat menolak bantuan karena mereka merasa mampu atau karena mereka mengalami perubahan ekonomi yang menguntungkan, seperti mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik atau memiliki usaha yang berkembang dengan baik. (Dzulhidayat, 2022)

1.5.6 Program Keluarga Harapan

PKH merupakan satu diantara jenis program Conditional Cash Transfer (CCT), dimana telah menjadi terkenal diseluruh negara sebagai cara untuk mengatasi kemiskinan kronis dan sebagai bagian dari upaya penagendalian sosial. hal tersebut bertujuan untuk memberikan dana masyarakat sangat miskin. Sebagai tindakan untuk mempercepat penurunan

tingkat kemiskinan di Indonesia, pemerintah telah memberlakukan Program Bantuan Tunai Bersyarat ,yang sekarang akrab sebagai Program Keluarga Harapan. PKH mewakili upaya komprehensif pertama di Indonesia untuk mengatasi kemiskinan secara individual, dengan menysasar 10% masyarakat termiskin (McCarthy et al., 2023)

Kemampuan keluarga untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam hal pendidikan dan kesehatan perlu ada, itulah alasan bantuan dana yang diberikan melalui PKH. Hanya keluarga yang termasuk dalam kategori keluarga sangat miskin yang diizinkan untuk mengambil bagian dalam program PKH, yang mencakup keluarga yang memiliki ibu hamil serta anak berusia antara 0 dan 15 tahun. Dengan menyediakan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan tertentu, Tujuan program perlindungan sosial ini adalah untuk memperbaiki kualitas hidup keluarga miskin.Diharapkan perilaku akan berubah untuk mendukung kesejahteraan sosial dengan memberikan akses ini (Alexandri, 2020).

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional mengacu pada pembatasan atau penjelasan konsep yang lebih mendalam tentang karakteristiknya. Tujuan utama adalah memungkinkan peneliti untuk mengembangkan alat ukur yang sesuai dengan signifikansi variabel yang telah didefinisikan konsepnya. Untuk mencapai tujuan ini, peneliti perlu menyertakan proses atau operasionalisasi, yaitu pengembangan alat ukur yang akan digunakan untuk menganalisis gejala atau variabel yang menjadi arah penelitian. Menurut penelitian ini, definisi operasional melalui:

4.1 Strategi Graduasi Kementerian Sosial RI

4.1.1 Mengupayakan Perubahan perilaku dan pola pikir kpm melalui wadah P2K2

4.1.2 Sinergi program dan komplementaritas program

4.1.3 Monitoring Perkembangan sosial ekonomi KPM PKH dan Pemetaan KPM Potensial

4.1.4 Percepatan Graduasi Melalui Pemberdayaan dan Intervensi PENA

4.2 Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Strategi Graduasi

4.3 Diskusi Hasil

1.7. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan pada penelitian ini dipilih dengan tujuan membantu peneliti memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat berlandaskan data lapangan terkait dengan strategi, intervensi, serta kendala yang terkait dengan kebijakan graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. Metode tersebut dimaksudkan guna menggambarkan sifat dan hubungan antara fenomena yang menjadi fokus penelitian.

1.7.1 Jenis Penelitian

Pendekatan deskriptif kualitatif diterapkan pada penelitian ini. Tujuan dari pemilihan pendekatan ini supaya memberikan gambaran yang sistematis dan akurat tentang fakta-fakta yang terkait dengan strategi, intervensi, dan kendala yang terkait dengan kebijakan graduasi KPM PKH. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami sifat dan hubungan antara variabel yang diteliti. Selanjutnya, informasi deskriptif diperoleh dari data yang dikumpulkan melalui proses pengolahan dan analisis kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait metode yang digunakan oleh Kementerian Sosial dalam mengurangi tingkat kemiskinan melalui implementasi kebijakan graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.

1.7.2 Sumber Data

Ada dua kategori sumber data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari pengamatan langsung di lapangan serta wawancara dengan subjek penelitian, yaitu Direktorat Perlindungan Sosial dan Direktorat Jaminan Sosial di Kementerian Sosial. Sedangkan data sekunder yang digunakan melibatkan Undang-Undang, notulen rapat, risalah rapat, Surat Keputusan Program Keluarga Harapan, serta data terkait lainnya yang relevan dengan penelitian. Seluruh data ini akan dianalisis dan dicocokkan dengan sumber data primer untuk kemudian dijelaskan dalam hasil dan hasil penelitian.

1.7.3 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Riset ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Sebagai pendekatan untuk mendapatkan informasi

yang diperlukan. Observasi digunakan untuk melihat dan memahami fenomena yang terkait dengan penelitian. Dengan hasil pengamatan dicatat oleh penulis. Wawancara dilakukan dengan pejabat dan staf dari Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Jakarta, serta dua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Jenis wawancara yang diterapkan melalui wawancara tidak terstruktur, dengan instrumen pengumpulan data berupa pertanyaan yang diajukan kepada narasumber. Dokumentasi melibatkan catatan pribadi penulis dan dokumen resmi yang diperoleh selama penelitian berlangsung, dan digunakan untuk melengkapi studi observasi dan wawancara.

1.7.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk kepada pihak yang menjadi objek penelitian dan memberikan informasi mengenai topik yang sedang diteliti. Subjek penelitian digunakan untuk mendapatkan data dan informasi terkait suatu permasalahan yang sedang diinvestigasi (Almahdi, 2019), Tempat di mana variabel penelitian diperoleh disebut sebagai subjek penelitian. maka dari itu, berikut ini adalah subjek dari penelitian ini:

Tabel 1.1 Subyek Penelitian

No	Nama	Keterangan
1.	Neneng Rusmayanti,S,ST,M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Madya/Koordinator Kependidikan
2.	Nicky Hermanto Putro	Pekerja Sosial Ahli Muda Subdit Validasi dan Terminasi
3.	Jaswadi, A.KS,M.Sc	Pekerja Sosial Ahli Muda Subdit Bantuan Sosial
4.	Risna Kusumaningrum,S.Sos	Pekerja Sosial Ahli Muda Subdit Kependidikan
5.	Diandini Rachmawati I	Pekerja Sosial Ahli Muda Subdit Kependidikan

6.	M. Imam Saputra	Pekerja Sosial Ahli Pertama Subdit Bantuan Sosial
7.	Diman	Koordinator PKH kota Jakarta Pusat
8.	“S”	KPM PKH
9.	“H”	KPM PKH

1.7.5 Teknik Analisis Data

Data yang dianalisis dari riset ini dihubungkan dengan pembuatan Program Keluarga Harapan di Kementerian Sosial. Analisis dilakukan dengan menggunakan tipe analisis Miles dan Huberman, dimana meliputi tiga tahap utama: pengurangan data, penyajian data (tampilan), serta pengambilan kesimpulan. (Moleong, 2018).

a. Reduksi Data

Pemilihan dan fokus terhadap penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang bermula dari catatan lapangan dikenal sebagai reduksi data. Dalam proses ini, data disusun melalui penggolongan, analisis, atau pengkategorisasian dengan memberikan penjelasan singkat, petunjuk, penghapusan yang tidak diperlukan, dan organisasi data. Tujuan dari reduksi data adalah agar data dapat diambil dan diverifikasi dengan efisien. Data yang telah direduksi mencakup semua informasi yang relevan terkait dengan masalah penelitian.

b. Display Data/Penyajian Data

Selepas menyelesaikan tahap reduksi data, tahap berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data adalah kumpulan data yang disusun dengan cara dimana memungkinkan untuk membuat kesimpulan atau mengambil tindakan. Tujuan penyajian data adalah untuk membuat hasil data lebih mudah diakses. Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti diagram alur, bagan, uraian naratif, dan hubungan antar kategori. Menyajikan data dalam bentuk ini memudahkan peneliti untuk memahami konteks informasi yang dihasilkan. dari fase tersebut, peneliti mengumpulkan data yang

relevan sehingga hasil riset memiliki relevansi supaya menjawab masalah penelitian. Penyajian data mencakup deskripsi dan proses analisis yang berkelanjutan hingga mencapai tahap kesimpulan.

c. Menarik Kesimpulan

Pada akhir proses penelitian, langkah terakhirnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. dari seluruh informasi yang dikumpulkan. Tujuan dari pengambilan kesimpulan atau verifikasi yang bertujuan menemukan serta mengerti makna, pola, penjelasan, alur sebab akibat, atau proposisi dari hasil penelitian. Miles dan Huberman menekankan bahwa proses analisis terjadi secara interaktif selama seluruh periode penelitian, melibatkan bolak-balik antara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil riset dapat disampaikan melalui bentuk cerita, dan penemuan ini menjadi langkah akhir dalam proses analisis dan pengolahan data secara keseluruhan.

